

# Etika Pembangunan: Kajian Alternatif dalam Studi Pembangunan

SUBHILHAR\*

Program Studi Pembangunan, FISIP USU  
Jalan T.M. Hanafiah, Kampus USU, Medan 20155  
Email: subhilhar@usu.ac.id

## ABSTRAK

Sebagai suatu studi multidisiplin, perkembangan studi pembangunan kini menjadi lebih relevan mengingat semakin kompleksnya masalah-masalah pembangunan, baik di negara-negara berkembang maupun di negara maju. Pembangunan saat ini masih dan semakin dihadapkan pada masalah kemiskinan, kesenjangan, dan ketidakadilan. Selama ini teori-teori seperti modernisasi, ketergantungan dan sistem dunia menjadi teori dan paradigma pembangunan yang dominan dalam literatur-literatur studi pembangunan. Artikel ini berargumen bahwa diperlukan pendekatan alternatif untuk menjelaskan dan memecahkan persoalan-persoalan pembangunan. Pendekatan alternatif tersebut adalah etika pembangunan, yang dapat memberikan kebijakan dan implementasi yang humanis dan tidak mengakibatkan runtuhnya budaya, terkorbannya kemanusiaan dan kesejahteraan masyarakat semata-mata demi keuntungan sekelompok orang ataupun ideologi tertentu. Etika pembangunan dapat menjadi paradigma alternatif untuk melengkapi teori-teori dominan yang sudah ada.

**Kata kunci:** studi pembangunan, etika pembangunan, kajian alternatif

## ABSTRACT

*As a multidisciplinary study, the development studies is becoming more relevant given the increasingly complex development problems, both in developing and developed countries. The current development is still faced with the problems of poverty, inequality, and injustice. So far, theories such as modernization, dependency, and world systems have become the dominant development theories and paradigms in development studies literature. This article argues that alternative approaches are needed to explain and solve development problems. The alternative approach is development ethics, which can provide policies and implementations that are humanist and do not result in the collapse of culture, the sacrifice of humanity, and the welfare of society solely for the benefit of a particular group of people or ideology. Development ethics can be alternative paradigm to complement the existing dominant theories.*

**Keywords:** development studies, development ethics, alternative approach

## PENDAHULUAN

Studi Pembangunan adalah suatu studi multidisiplin (ekonomi, politik, sosiologi, psikologi, budaya, sejarah, dan lain-lain) dengan fokus perhatian kepada negara-negara berkembang dan interaksi negara berkembang dengan negara maju dan di antara negara berkembang itu sendiri. Sejak akhir tahun 1940-an pembangunan telah menjadi perhatian bagi penelitian akademik dan pengajaran yang penting terutama di negara-negara yang baru merdeka (*postcolonial states*). Sejak itu istilah pembangunan diasosiasikan dengan kondisi dan situasi ekonomi, politik, dan perubahan sosial di negara-negara baru merdeka. Dapat dikatakan bahwa studi pembangunan adalah ilmu sosial terapan.

Perkembangan Studi Pembangunan saat ini menjadi lebih relevan mengingat semakin kompleksnya permasalahan pembangunan, tidak saja di negara-negara berkembang namun juga di negara maju. Permasalahan klasik pembangunan adalah kemiskinan, kesenjangan, dan ketidakadilan yang masih terus terjadi. Tantangan Studi Pembangunan adalah menjembatani kesenjangan dan ketidakadilan, mempromosikan penanganan konflik dengan jalan yang damai, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berbagai teori pembangunan yang muncul pun seolah-olah tak mampu mengatasi persoalan yang dihadapi masyarakat dunia. Teori-teori ekonomi sejak dari neoklasik ekonomi konvensional sampai liberalisasi dan deregulasi juga tidak membuat bangsa-bangsa di dunia menjadi sejahtera seperti apa yang dicita-citakan.

Teori pembangunan terus mengalami perkembangan termasuk bertambah luasnya kajian dan bidang ilmu yang memberikan kontribusi. Salah satunya adalah masuknya ilmu filsafat dan etika dalam mengkaji teori dan praktik pembangunan, salah satu paradigma yang sekarang amat dibutuhkan dalam menilai manfaat dan dampak pembangunan. Kajian tersebut dikenal dengan Etika Pembangunan. Pembahasan tentang Etika Pembangunan semakin relevan dengan kondisi bangsa yang belum menggembirakan. Kebijakan pembangunan yang masih lebih menekankan pada dimensi ekonomi dan fisik, belum menyentuh dimensi lainnya, terutama moralitas. Padahal kita tahu dan sadar bahwa seluruh kegiatan pembangunan diperuntukkan bagi kesejahteraan dan martabat manusia.

Beberapa tahun terakhir banyak perubahan substansial yang terjadi dalam disiplin Studi Pembangunan. Namun begitu, tetap saja terjadi kontroversi tentang makna dan arti pembangunan. Kesepakatan para ahli pembangunan hanya pada masalah-masalah yang dihadapi negara. Kajian alternatif dalam Studi Pembangunan, berkembang terutama berkaitan dengan kebutuhan akan percepatan pertumbuhan (ekonomi), hutang luar negeri, kemiskinan, mengurangi kelaparan, buta aksara, pencegahan penyakit menular, kesetaraan gender, dan kerusakan lingkungan. Pada awalnya hampir semua literatur pembangunan mengasumsikan pembangunan dalam arti meningkatkan pertumbuhan ekonomi (*economic growth*). Ketika pertumbuhan ekonomi terjadi maka kekayaan yang terbentuk, lambat laun akan menetes kepada masyarakat banyak. Artinya persoalan produksi lebih penting daripada distribusi (pemerataan). Pendekatan ini banyak menuai kritik terutama dari negara-negara miskin. Maka kemudian pendekatan pembangunan berubah menjadi pemenuhan kebutuhan dasar (*basic needs approach*).

Dari pengertian yang minimal yaitu pangan, papan, dan sandang menjadi lebih luas yakni kebutuhan akan pelayanan dasar seperti air minum, sanitasi, kesehatan, pendidikan, transportasi, dan kesempatan kerja. Bahkan kebutuhan dasar berkembang menjadi faktor-faktor kualitatif seperti lingkungan yang nyaman, pengambilan kebijakan yang partisipatif, dan hak-hak minoritas. Indikatornya pun bukan hanya Pendapatan Domestik Bruto ataupun Indeks Gini namun indikator sosial juga berkembang dari Physical Quality of Life Index (PQLI), sampai Human Development Index (HDI) yang variabel-variabelnya terus berkembang. Pengertian pembangunan juga berkembang ke area politik dan budaya atau kultur.

Dalam perspektif politik, pembangunan politik diartikan kepada demokrasi. Walaupun indeks pembangunan politik masih diukur dengan demokrasi barat (*western-style democracy*), bagi bangsa atau kelompok yang tertindas, pembangunan diartikan sebagai *liberation*, di mana adanya kebebasan menentukan atau mengontrol semua urusan dan tidak dapat dibatasi oleh negara, bangsa, atau kelompok lain walaupun belum tentu menciptakan keadaan kesehatan dan pendidikan yang lebih baik.

Dalam perspektif budaya, pembangunan diartikan tidak memberangus nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Contohnya pada saat Revolusi Iran yang membentuk penciptaan masyarakat Islami dan keluar dari kekuasaan Shah Iran, penganut modernisasi, yang dianggap melunturkan nilai-nilai Islam. Demikian juga di Jepang misalnya nilai-nilai tradisional tetap dijaga bersamaan dengan proses modernisasi.

Todaro (1981) memberikan pengertian pembangunan sebagai proses multidimensi mencakup perubahan penting dalam struktur sosial, sikap masyarakat dan lembaga-lembaga nasional dan akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengurangan kesenjangan (*inequality*), dan pemberantasan kemiskinan absolut. Soedjatmoko (1986) mengatakan proses pembangunan adalah suatu perubahan sosial budaya. Sen (1999) mengartikan pembangunan sebagai suatu “*process of expanding the real freedoms that people can enjoy (removal of mayor source of unfreedom: poverty, tyranny, poor economic opportunities & systematic social deprivation, neglect of public utilities & the intolerance or over activity of repressive regimes)*”.

Pengertian-pengertian seperti di atas yang sekarang berkembang dan dianut oleh para ahli Studi Pembangunan. Singkatnya pembangunan adalah proses perubahan masyarakat pada hampir semua aspek kehidupan. Dalam dimensi ekonomi, pembangunan berkaitan dengan penciptaan kekayaan dan peningkatan kondisi kehidupan sosial yang didistribusikan secara merata. Dalam dimensi sosial, pembangunan bermakna kondisi kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan perumahan yang baik. Dalam dimensi politik, pembangunan diartikan sebagai penegakan hak asasi manusia, kebebasan politik, dan demokrasi. Dimensi budaya adalah pengakuan akan identitas, kelompok, etnis, atau bangsa dan harga diri yang diwujudkan dalam sistem, simbol-simbol, dan kepercayaan. Sementara dalam dimensi lingkungan, pembangunan adalah pembangunan yang berkelanjutan untuk masa depan generasi selanjutnya.

## DOMINASI TIGA TEORI PEMBANGUNAN

Dalam kepustakaan teori pembangunan, teori yang paling dominan adalah teori modernisasi, teori ketergantungan, dan kemudian diikuti dengan berkembangnya teori sistem dunia. Sampai saat ini berbagai teori dan paradigma yang muncul adalah variasi ketiga teori di atas.

Teori modernisasi merupakan teori yang banyak dianut oleh negara-negara berkembang dan mendominasi perkembangan studi pembangunan. Teori modernisasi berasal dari konsep-konsep dan metafora yang diturunkan dari teori evolusi. Perubahan sosial pada dasarnya merupakan gerakan searah, linier, progresif dan perlahan-lahan, yang membawa masyarakat berubah dari tahapan primitif ke tahapan yang lebih maju, dan membuat berbagai masyarakat memiliki bentuk dan struktur serupa. Teori modernisasi melihat persoalan kemiskinan dan keterbelakangan disebabkan oleh faktor-faktor internal (misalnya manusia, nilai-nilai budaya, atau struktur sosial) yang terdapat dalam masyarakat atau negara tersebut. Faktor pendorong dan penghambat pembangunan ada di dalam negara itu sendiri. Pendidikan yang rendah atau nilai-nilai budaya yang kurang menghargai waktu misalnya dapat menjadi penyebab ketertinggalan. Maka strategi pembangunan yang dianutnya adalah memperbaiki kondisi di dalam negara tersebut, meningkatkan pendidikan, dan mengubah nilai budaya yang tidak mendukung kemajuan. Beberapa ahli yang sering disebut dalam kelompok teori ini adalah McClelland (1984), Inkeles (1969), Smelser (1967), Rostow (1991), Coleman (1968), dan Bellah (1985).

Beberapa ciri teori modernisasi adalah:

1. Modernisasi mendasarkan pada konsep yang mempertentangkan modern (rasional dan efisien) dan tradisional (irasional dan tidak efisien).

2. Modernisasi merupakan proses bertahap. Teori Rostow misalnya, membedakan berbagai fase pertumbuhan ekonomi yang hendak dilalui oleh setiap masyarakat. Dari tatanan primitif dan sederhana menuju dan berakhir pada tatanan yang maju dan kompleks.
3. Modernisasi sebagai proses homogenisasi. Dengan modernisasi akan terbentuk berbagai masyarakat dengan tendensi dan struktur serupa. Levy (1996) mengatakan “sesuai dengan perkembangan waktu, mereka dan kita akan semakin mirip satu sama lain...”, karena model modernisasi menjanjikan bahwa semakin modern tahapan yang telah dilalui, semakin serupa bentuk dan karakteristik berbagai masyarakat yang terlibat dalam perubahan sosial ini. Modernisasi diartikan menjadi sama dengan Barat (westernisasi).
4. Modernisasi dilihat sebagai proses yang tidak bergerak mundur. Proses modernisasi tidak bisa dihentikan. Ketika telah terjadi kontak antara negara Dunia Ketiga dengan negara maju, negara Dunia Ketiga tidak akan mampu untuk menolak melakukan upaya modernisasi. Garis besar, arah, dan prospek masa depan negara Dunia Ketiga akan sama, sekalipun derap pertumbuhan dan perubahannya berbeda satu sama lain. Dalam hal ini, modernisasi dilihat sebagai “jawaban universal” persoalan Dunia Ketiga tanpa memperhatikan ciri-ciri atau karakteristik negara Dunia Ketiga.
5. Modernisasi merupakan perubahan progresif. Sekalipun akibat samping maupun korban modernisasi beraneka macam dan terkadang berada di luar batas-batas nilai kemanusiaan dan moral universal, dalam jangka panjang, modernisasi tidak hanya sekedar merupakan sesuatu yang pasti terjadi, tetapi modernisasi dilihat sebagai sesuatu yang diperlukan dan diinginkan. Coleman (1968) dan Smelser (1967) misalnya menyatakan bahwa sistem politik modern memiliki kapasitas yang lebih besar dan lebih efisien dalam melaksanakan fungsi-fungsi masyarakat dibanding sistem politik tradisional.
6. Modernisasi dilihat sebagai proses evolusioner. Modernisasi memerlukan waktu panjang, bukan perubahan revolusioner. Diperlukan waktu beberapa generasi bahkan berabad-abad untuk sampai pada tahapan akhir, dan hanya waktu dan sejarah yang dapat menyaksikan keseluruhan proses, hasil, dan akibat langsung maupun tidak langsung.

Teori ketergantungan merupakan kritik dari teori modernisasi yang dianggap terlalu menekankan aspek internal negara berkembang tanpa melihat kondisi hubungan yang tidak seimbang (eksploitatif) antara negara berkembang dengan negara maju. Awalnya berkembang di negara-negara Amerika Latin. Teori ini melihat persoalan kemiskinan dan keterbelakangan disebabkan oleh faktor-faktor eksternal (struktur perekonomian internasional) yang terdapat dalam masyarakat atau negara tersebut. Maka pemutusan hubungan yang eksploitatif dengan negara-negara maju menjadi salah satu jalan untuk kemajuan negara berkembang. Para pengagas teori ini antara lain Prebisch (1950), Baran (1968), Frank (1967), dos Santos (1970), Amir (1976), Warren (1973), Cardoso (1973), dan Evans (1979).

Beberapa ciri teori ketergantungan adalah:

1. Faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinan dan keterbelakangan ditentukan dan didorong oleh faktor eksternal yaitu eksploitasi yang dilakukan oleh negara maju (pusat) terhadap negara berkembang (periferi=pinggiran).
2. Pembangunan yang dilalui oleh negara berkembang tidak melalui proses yang sama dengan negara maju tergantung pada sejarah, sistem, dan struktur yang ada di negara masing-masing.

3. Proses pembangunan di negara maju (kapitalisme) menciptakan keterbelakangan (*underdevelopment*) di negara pinggiran.
4. Proses perubahan yang terjadi adalah revolusioner dengan kata lain pemutusan hubungan dengan negara pusat harus dilakukan dan pembangunan yang alamiah akan terjadi di negara pinggiran.

Teori sistem dunia merupakan hasil dari ketidakpuasan Immanuel Wallerstein (*Dependence in an Interdependent World*) atas teori ketergantungan. Wallerstein merevisi kelompok negara menjadi tiga, yakni pusat (*center*), semi pinggiran (*semi-periphery*), dan pinggiran (*periphery*), serta menekankan pada analisis totalitas dan terbuka. Negara tidak bisa dianalisis secara mandiri dan terpisah dari sistem dunia. Kondisi suatu negara ditentukan oleh dinamika sistem dunia. Teori ini salah satunya mampu menjelaskan tumbuhnya negara industri baru seperti Singapura atau Korea Selatan. Walaupun pembangunan telah membawa keadaan negara berkembang pada kondisi yang lebih baik, namun tetap saja meninggalkan berbagai kritik atas pembangunan yang telah dilakukan. Berbagai akibat yang terjadi antara lain kerusakan lingkungan, timbulnya penyakit baru, atau kekayaan yang tercipta hanya dinikmati sebahagian kecil masyarakat. Berbagai istilah muncul seperti pembangunan yang *misdevelopment, maldevelopment, inequitable, irresponsible* bahkan cenderung destruktif. Di Indonesia pembangunan dipahami sebagai jargon Orde Baru yang negatif. Singkatnya pembangunan telah menghasilkan dampak negatif dan cenderung merusak. Pembangunan di negara-negara berkembang telah menyebabkan tidak saja gangguan fisik tetapi juga kultural, nilai-nilai, kemanusiaan, bahkan peradaban manusia.

## ETIKA DALAM STUDI PEMBANGUNAN

Maka semakin disadari diperlukan pendekatan baru dalam Studi Pembangunan termasuk salah satunya kajian berkenaan dengan Etika Pembangunan. Etika Pembangunan harus diletakkan bersama-sama dengan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, dan politik untuk memecahkan persoalan pembangunan. Ide pembangunan sebagai peningkatan kualitas masyarakat adalah nilai relatif yang cenderung berupa keuntungan dan biaya ekonomi. Etika pembangunan mencoba mengklarifikasi, menilai dan memperluas pengertian tentang nilai tidak saja pada nilai ekonomi.

Strategi dan jalannya pembangunan biasanya melibatkan pengorbanan dan biaya kemanusiaan. Perkembangan etika pembangunan diawali dengan penilaian yang dilakukan para ahli dan praktisi pembangunan terhadap teori-teori dan praktik-praktik pembangunan.

Pada tahun 1940-an, Gandhi di India, Prebisch di Amerika Latin dan beberapa ahli di berbagai bagian dunia mengkritisi kolonialisme dan pendekatan pembangunan ekonomi. Kemudian Lebert (1959), Goulet (1971) dan Berger (1974). Goulet misalnya mengatakan bahwa "*development needs to be redefined, demystified, and thrust into the arena of moral debate*". Etika dan nilai harus menjadi pertanyaan dalam teori, perencanaan, dan praktik pembangunan. Pembangunan akan kehilangan makna jika mengorbankan kemanusiaan.

Pada awal 1970-an di Amerika juga terjadi perdebatan tentang kewajiban moral bangsa atau warga dalam memberikan bantuan kepada kelompok masyarakat yang ditimpa kelaparan di negara-negara berkembang, seperti Singer (1972) dengan "*utilitarian argument for famine relief*" dan Hardin (1974) dengan "*lifeboat ethics*". Hal ini didukung oleh Nigel Dower, Onora O'Neill and Jerome M. Segal pada tahun 1980-an, namun program bantuan pangan hanya satu bagian dari solusi mengatasi kelaparan, kemiskinan, keterbelakangan, dan ketidakadilan internasional. Apa yang diperlukan menurut mereka tidak sekadar etika bantuan, namun sesuatu yang lebih komprehensif, empirik, dan relevan dengan kebijakan yaitu "*Ethics of Third World Development*".

Pada perkembangan berikutnya Sen yang mengadopsi Streeten tentang “*Basic Human Needs*” menyatakan bahwa pembangunan bukan hanya diartikan kepada pertumbuhan ekonomi, industrialisasi, atau modernisasi, namun sebagai “*the expansion of people’s ‘valuable capabilities and functionings’: what people can or cannot do, e.g., whether they can live long, escape avoidable morbidity, be well nourished, be able to read and write and communicate, take part in literary and scientific pursuits, and so forth*” (Sen 1984).

Para ahli Studi Pembangunan sepakat bahwa dimensi moral dari teori dan praktik pembangunan merupakan komponen yang sama pentingnya dengan ilmu itu sendiri dan kebijakan yang dibuat. Pertumbuhan ekonomi sangat mungkin berakibat buruk kepada manusia, masyarakat, atau lingkungan. Pertanyaan yang diajukan dalam kerangka etika pembangunan adalah: Apa kriteria pembangunan yang baik?; konsep pembangunan apa yang dipakai? apa tujuan, prinsip, dan strategi yang menjadi landasannya?; isu-isu moral apa yang muncul dalam praktik dan pembuatan kebijakan serta bagaimana cara mengatasinya?; bagaimana keterbatasan dan manfaat pembangunan didistribusikan?; siapa dan apa yang bertanggungjawab terhadap pembangunan?; apa kendala yang paling serius dalam pembangunan yang baik (*good development*)? (Crocker, 1996).

Menurut Goulet (1997) Etika Pembangunan adalah “*the examination of ethical and value questions posed by development theory, planning, and practice*”. Sejalan dengan Goulet, Crocker (1991) mendefinisikan Etika Pembangunan sebagai “*the normative or ethical assessment of the ends and means of Third World and global development*”. Dari definisi tersebut, ada tiga fungsi utama Etika Pembangunan. Pertama, mengangkat nilai-nilai sebagai suatu kebutuhan (*needs*) bukan sekedar kemauan (*wants*); berbasis pada keadilan (*justice*) bukan sekedar sedekah (*charity*); keadilan yang bukan bersifat individual atau perilaku tetapi terstruktur dan terlembaga; dan tidak sekedar memanipulasi sumber-sumber (kekayaan, kekuasaan, informasi, dan pengaruh). Kedua, memformulasikan strategi-strategi yang etis dalam pemecahan masalah pembangunan. Ketiga, menemukan jalan yang menggambarkan alternatif proses perencanaan yang layak (secara teknis, politik, dan etika).

Kesimpulannya adalah bagaimana Etika Pembangunan memberikan kebijakan dan keputusan pembangunan dan implementasi yang humanis dan tidak mengakibatkan runtuhnya budaya, terkorbannya kemanusiaan dan kesejahteraan masyarakat semata-mata demi keuntungan sekelompok orang, ideologi tertentu ataupun alasan efisiensi. Misi utama Etika Pembangunan adalah *to keep hope alive* (harapan tetap ada) untuk menciptakan berbagai kemungkinan menuju kemakmuran. Lebert mengatakan “*development as a revolution leading to universal solidarity*”.

Ada dua cara dalam memformulasikan etika pembangunan menjadi bidang kajian (Goulet 1997):

1. Melalui keterlibatan sebagai perencana (*planner*) atau agen perubahan dalam praktik pembangunan, dalam usaha mengartikulasikan secara formal strategi yang etis. Model studi yang dipakai adalah mengupas nilai-nilai laten yang terkandung dalam setiap kebijakan, program, dan proyek pembangunan. Etika pembangunan dipandang sebagai metode dan prosedur penelitian yang berbeda; prinsip-prinsip umum sebagai pedoman memformulasikan strategi-strategi yang etis; strategi yang etis dalam pengambilan keputusan dan aksi pembangunan yang spesifik; dan penyedia standar normatif untuk mengevaluasi kinerja pembangunan.
2. Berasal dari kritik internal teori etika konvensional yang berkembang menjadi etika pembangunan. Memusatkan perhatian pada teori dan praktik pembangunan yang berkaitan dengan lingkungan, keteraturan dunia, dan area antardisiplin. Analisis formal yang dilakukan pada isu-isu: justifikasi utama pada hak asasi, kebutuhan,

kapasitas dan hak menguasai; penilaian etika pada kebijakan yang berdampak pada korban dan marginalisasi akibat proses pembangunan; evaluasi kompetisi antara ekonomi, politik, dan sistem sosial; dan konsep baru mengenai keamanan (*security*). Pada perkembangan berikutnya, dikenal juga apa yang disebut etika global yang didorong oleh kekuatan-kekuatan politik, yang merupakan reaksi atas Perang Dunia II di mana banyak terjadi pembunuhan dan kehancuran akibat perang.

## SIMPULAN

Dalam kondisi negara dan bangsa seperti sekarang maka Etika Pembangunan menjadi sangat relevan untuk dikembangkan dan diimplementasikan dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara guna mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur seperti yang dicita-citakan bersama. Ada tiga agenda utama yang dapat dilakukan dalam kerangka pengembangan Etika Pembangunan.

Pertama, dalam usaha mengembangkan Etika Pembangunan sebagai salah satu bidang kajian maka perlu dilakukan penelitian dan kajian yang lebih mendalam untuk memasukkan etika dalam teori, konsep, dan praktik pembangunan. Sumber-sumber nilai dan etika dapat berasal dari agama, adat-istiadat, kearifan lokal, tradisi, dan ideologi yang ada di masyarakat dan bangsa Indonesia. Malaysia misalnya, mengembangkan konsep pembangunan “Islam Hadari”, dengan sepuluh prinsip yang diyakini dapat membawa Malaysia berkompetisi dan membangun peradaban yang Islami. Etika Pembangunan dapat dikembangkan kepada Etika Pemerintah (*Good Government*), Etika Politik (*the Practices of Good Politics*), Etika Bisnis (*Good Corporated Governance*) yang kesemuanya akan berujung pada *Good Governance* dengan tiga pilar: pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat.

Kedua, dalam pendidikan dan pengajaran, sebagai ilmu multidisiplin, Etika Pembangunan sebagai filsafat dan ilmu sosial terapan harus menjadi bahan ajar utama bagi mahasiswa khususnya pada program studi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Ilmu Ekonomi maupun ilmu yang berkaitan dengan pembangunan baik pada jenjang S1, S2, maupun S3.

Ketiga, pada saat berkembangnya perilaku moral hazard seperti *shirking* (perilaku molor dan mengulur waktu demi keuntungan pribadi); *hold-up* (merongrong kebijakan); *risk-aversion* (perilaku yang mencoba menghindari risiko); *free riders* (demi mendapatkan keuntungan dengan ikut serta tapi tidak memberikan kontribusi apapun); hingga *rent seekers* (perilaku memburu keuntungan pribadi atau kelompok).

Etika Pembangunan menjadi keharusan untuk disemaikan bagi para pembuat dan pengambil kebijakan, kalangan pelaku pembangunan untuk menjadi landasan berpijak agar pembangunan dan kebijakan yang dihasilkan tidak destruktif dan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Preston (1996) mengatakan: "*ethics is concerned about what is right, fair, just, or good; about what we ought to do, not just about what is the case or what is most acceptable or expedient*".

## DAFTAR PUSTAKA

- Amir, Samir. 1976. *Unequal Development: An Essay on the Social Formations of Peripheral Capitalism*. Sussex: Harvester Press.
- Baran, Paul. 1968. *The Political Economy of Growth*. New York: Monthly Review Press.
- Bellah, Robert. 1985. *Tokugawa Religion: The Cultural Roots of Modern Japan*. New York: Free Press.
- Berger, Peter. 1974. *Pyramids of Sacrifice: Political Ethics and Social Change*. New York: Basic Books.

- Cardoso, Fernando Henrique. 1973. "Associated-Dependent Development: Theoretical and Practical Implications", dalam *Authoritarian Brazil: Origins, Policies, and Future*. New Haven: Yale University Press.
- Coleman, James. 1968. "Modernization: Political Aspects", dalam Sills, David (ed), *International Encyclopedia of the Social Sciences*, New York: Macmillan.
- Crocker, David. 1991. "Toward Development Ethics". *World Development*, Vol 19 No 5, hal 457-483.
- Crocker, David. 1996. "Hunger, Capability, and Development", dalam Aiken, Williamugh. dan La Follette, H. (ed), *World Hunger and Morality*.
- Dos Santos, Theotonio. 1970. "The Structure of Dependence", *The American Economic Review*, Vol 60 No 2, hal 231-236.
- Evans, Peter. 1979. *Dependent Development: The Alliance of Multinational, State, and Local Capital in Brazil*. Princeton: Princeton University Press.
- Frank, Andre Gunder. 1967. *Capitalism and Underdevelopment in Latin America: Historical Studies of Chile and Brazil*. New York: Monthly Review Press.
- Goulet, Denis. 1971. *The Cruel Choice*. New York: Atheneum.
- Goulet, Denis. 1997. "Development Ethics: A New Discipline". *International Journal of Social Economics*, Vol 24 No 11, hal 1160-1171.
- Hardin, Garrett. 1974. "Lifeboat Ethics: The Case Against Helping the Poor". *Psychology Today*, Hal 800-812.
- Inkeles, Alex. 1969. "Making Men Modern: On the Causes and Consequences of Individual Change in Six Developing Countries". *American Journal of Sociology*, Vol 75 No2, hal 208-225.
- Lebret, L.L. 1959. *La Montée Humaine*. Paris: Les Éditions Ouvrières.
- Levy, Marion. 1996. *Modernization and the Structure of Societies: Aspects of Social Structure in Modernised and Non-modernised Societies*. New York: Routledge.
- McClelland, David. 1984. *The Achievement Motive in Economic Growth*. New York: Routledge.
- Prebisch, Raul. 1950. "The Economic Development of Latin America and Its Principal Problems", *UN Department of Economic Affairs*, New York.
- Preston, Noel. 1996. *Understanding Ethics*. Alexandria: Federation Press.
- Rostow, Walt. 1991. *The Stages of Economic Growth: A Non-Communist Manifesto (3<sup>rd</sup> edition)*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Sen, Amartya. 1984. "The Living Standard". *Oxford Economic Papers* Vol 36, hal 74-90.
- Sen, Amartya. 1999. *Development as Freedom*. Oxford: Oxford University Press.
- Singer, Peter. 1972. "Famine, Affluence, and Morality". *Philosophy and Public Affairs*, Vol 1 No 3, hal 229-243.
- Smelser, Neil. 1967. "Toward a Theory of Modernization", The Natural History Press, hal 29-48.
- Soedjatmoko. 1986. *Dimensi Manusia dalam Pembangunan: Pilihan Karangan*. Jakarta: LP3ES.
- Todaro, Michael. 1981. *Economic Development in the Third World*. London: Longman.
- Warren, Bill. 1973. "Imperialism and Capitalist Industrialization", *New Left Review* Vol 81.